BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pasar bebas ASEAN yang dihadapi negara Indonesia pada tahun 2015 menyebabkan ketatnya persaingan bisnis yang ada (Hastuti, 2015). Dalam menghadapi semua keadaan tersebut, maka perusahaan yang ada di negara Indonesia harus mampu bersaing, kalau tidak mampu bersaing maka perusahaan-perusahaan yang ada di negara Indonesia dapat berakibat pada aktivitas atau kegiatan bisnis yang menjadi buruk. Apabila perusahaan tersebut tidak bisa bertahan dapat menyebabkan keuangan yang ada di perusahaan tersebut menjadi tidak sehat (*financial distress*) atau hal paling parah yang dialami perusahaan ialah kebangkrutan (Hastuti, 2015). Dilakukannya pendeteksian dini, supaya perusahaan dapat mencegah atau terhindar dari terjadinya kebangkrutan pada perusahaan tersebut (Hastuti, 2015).

Pembayun dan Januarti (2012) mengatakan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi seperti serangkaian kesalahan, contohnya seperti kesalahan dalam mengambil keputusan dan kelemahan-kelemahan dalam hal sumbang-menyumbang yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung pada manajemen dan minimnya upaya dalam mengawasi pada bagian keuangan perusahaan yang digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Agar perusahaan tersebut dapat menggapai tujuan yang diharapkan hingga mampu bersikukuh dalam dunia usaha, hal ini dapat dihubungkan dengan pasar modal internasional, pemakai laporan keuangan serta profesi akuntansi Ellomi dan Gueyie (2001; dalam Pembayun dan Januarti, 2012). Seperti tahun 1997 negara Indonesia mengalami permasalahan yaitu krisis *financial* atau kesulitan dalam hal keuangan, dimana menurut Pembayun dan Januarti (2012) terjadinya *financial distress* dikarenakan adanya kemerosotan dari keuangan perusahaan sebelum perusahaan tersebut mengalami likuidasi maupun kebangkrutan. Umumnya terjadinya keadaan seperti ini ditandai adanya proses tertundanya pengiriman, berkurangnya kualitas dari suatu produk, serta tertundanya proses pembayaran

dari bank (Pembayun dan Januarti, 2012). Ketika keadaan dari *financial distress* diketahui oleh perusahaan maka perusahaan diharapkan untuk segera melakukan tindakan supaya perusahaan tidak mengalami tahap kesulitan yang berat seperti likuidasi maupun kebangkrutan (Pembayun dan Januarti, 2012).

Terdapat faktor lain selain memanfaatkan indikator kinerja keuangan yang ada disuatu perusahaan mengenai prediksi terjadinya *financial distress* yaitu melemahnya *corporate governance* yang ada di perusahaan. Karena banyak ahli-ahli mengatakan kelemahan yang ada di *corporate governance* adalah salah satu hal yang menyebabkan perekonomian di negara Asia memburuk, salah satunya negara Indonesia yang terjadi di tahun 1997 dan 1998 oleh karena itu *corporate governance* dikatakan sebagai salah satu sumber utama dari kerawanan ekonomi hal ini dinyatakan oleh Husnan (2001; dalam Pembayun dan Januarti, 2012). Ho dan Wong (2001; dalam Pembayun dan Januarti, 2012) mengatakan terjadinya krisis keuangan yang ada di negara Asia selain dikarenakan hilangnya suatu kepercayaan diri dari para investor namun disebabkan karena mundurnya *corporate governance* yang efektif. Salah satu contoh lemahnya penerapan *corporate governance* yang ada dinegara Indonesia yaitu PT. Kimia Farma, Bank Lippo serta PT. Indofarma karena itu dalam membenahi pengelolaan dari korporasi diperlukan yang namanya *good corporate governance*, hal ini dinyatakan oleh Boediono (2005; dalam Pembayun dan Januarti, 2012).

(Gunawijaya, 2015) mengatakan tujuan adanya mekanisme *corporate governance* yaitu memberikan suatu nilai tambah kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan sehingga tidak ada konflik yang terjadi antara pihak *agent* dan *principal*, oleh karena itu diperlukannya suatu teori keagenan, dimana hal utama dari teori ini yaitu karena terdapat suatu hubungan kerja dari pihak yang memberikan wewenangnya yaitu pihak investor kepada pihak penerima wewenang tersebut yaitu manajer. Dengan dipisah nya pengelolaan perusahaan antara pihak *principal* (pemilik) dengan pihak *agent* (manajemen) pada suatu literatur akuntansi disebut sebagai teori keagenan. Dalam teori ini hubungan dari agensi akan timbul ketika *principal* memperkerjakan *agent* (orang lain) supaya menyerahkan jasanya yang setelah itu memberikan kewenangan dalam

mengambil pertimbangan kepada pihak *agent*. Ketidakseimbangan informasi ini mengarah pada hubungan antara pihak *principal* dengan pihak *agent*, karena informasi yang dimiliki pihak *agent* lebih banyak daripada pihak *principal*. Oleh karena itu untuk meminimalkan permasalahan keagenan, maka dalam suatu perusahaan dibutuhkan penerapan *good corporate governance*.

International Finance Corporation mendefinisikan *Corporate governance* sebagai “struktur dan proses untuk arah dan kontrol perusahaan.” (OJK, 2014). Berkaitan dengan baiknya *good corporate governance* perusahaan, maka komite audit merupakan salah satu prosedur dari *good corporate governance* yang ada didalam suatu perusahaan untuk dilakukannya pengendalian internal pada perusahaan tersebut. Selain itu, Machmud, (2008; dalam Irwanto, 2013) mengatakan bahwa kepemilikan institusional juga mempengaruhi kinerja dari suatu perusahaan oleh karena itu kepemilikan institusional dapat mendorong adanya suatu pengawasan, sehingga pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan lebih optimal. Terdapat peraturan dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mengenai pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit dengan Nomor 55/POJK.04/2015. Dimana komite audit didefinisikan sebagai mekanisme dari *Corporate Governance* yang diprediksi bisa mengurangi suatu permasalahan dari keagenan yang timbul disuatu perusahaan.

Komite audit memiliki tujuan dan manfaat bagi perusahaan antara lain dilakukannya pengawasan secara independen atas mekanisme pembuatan laporan keuangan serta implementasi dari audit eksternal, melakukan pemantauan terhadap operasi pengendalian risiko dan kontrol secara indepen, serta melakukan inspeksi mengenai prosedur dilakukannya *corporate governance* secara independen (Pembayun dan Januarti, 2012). Agar perusahaan dapat menghindari permasalahan keuangan serta dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan maka diperlukan mekanisme *corporate governance* yang baik (Pembayun dan Januarti, 2012). Terdapat beberapa faktor dari adanya efektivitas kinerja dari komite audit dan diukur dengan karakteristik yang dimiliki yaitu ukuran, independensi, frekuensi pertemuan komite audit, dan kompetensi yang dimiliki anggota komite audit (Pembayun dan Januarti, 2012).

Proses terjadinya *corporate governance* yang baik pada suatu perusahaan maka peran dari komite audit sangatlah vital (Wardhani dan Joseph, 2010). Supaya tugas dari komite audit berjalan dengan efektif, diperlukannya suatu karakteristik yang memadai agar dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dapat maksimal (Wardhani dan Joseph, 2010). Dari karakteristik tersebut para komite audit diharapkan bisa menjadi dasar kepercayaan terhadap para anggota komite audit yang nantinya mereka bisa berkerja secara maksimal dan sebaik mungkin (Wardhani dan Joseph, 2010). Karakteristik komite audit ini terdapat diperaturan yang dikeluarkan oleh OJK Nomor 55/POJK.04/2015 yaitu:

Faktor yang pertama ada ukuran komite, dimana menurut Rahmat dan Iskandar (2009; dalam Elyanto dan Syafruddin, 2013) pada saat terbentuknya komite audit yang efektif mereka akan melakukan tugasnya yaitu mengawasi serta mengendalikan setiap aktivitas dari dewan direksi, dan jumlah anggota komite audit haruslah cukup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Menurut Dalton, Daily dan Ellstrand (1999; dalam Elyanto dan Syafruddin, 2013) mengatakan ukuran komite audit akan tidak efektif apabila jumlah dari anggota komite audit ini terlalu kecil ataupun besar. Apabila kuantitas dari komite audit sangat banyak maka mereka akan tidak fokus dan kurang berpartisipasi saat menjalankan tugasnya, sebaliknya untuk jumlah komite audit yang kecil atau kurang maka mereka akan mempunyai kelemahan di dalam hal pengetahuan maupun keterampilan diungkapkan oleh Elyanto dan Syafruddin (2013). Menurut Rahmat dan Iskandar (2009; dalam Elyanto dan Syafruddin, 2013) mengatakan bahwa terbentuknya komite audit dengan kuantitas yang benar menjadikan anggota dari komite audit ini melaksanakan tugasnya dengan keahlian serta pengalaman yang mereka punya agar dapat melindungi kepentingan dari para pemegang saham. Dimana pendapat yang muncul dari setiap anggota komite audit ini didapat dari fungsi pengawasan yang telah dilakukan oleh pihak komite audit sehingga ditahun berikutnya perusahaan akan terbebas dari *financial distress* yang dikarena perolehan dari laporan keuangan untuk komite audit ini berpengaruh terhadap kinerja dari manajemen untuk ditahun yang akan datang (Gunawijaya, 2015). Menurut Krisnauli dan Hadiprajitno (2014) mengatakan bahwa

mengurangi suatu pembiayaan dari keagen merupakan solusi yang tepat bagi komite audit, karena dengan adanya suatu komite audit yang efektif maka dapat menambah suatu kualitas dari laporan keuangan tahunan yang diaudit sehingga dapat menolong pihak dewan direksi dalam memajukan kepentingannya pada pihak pemegang saham. Penelitian yang dibuat oleh Januarti dan Pembayun (2012) mengatakan ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Penelitian yang dibuat Kristanti dan Syafrudin (2012; dalam Gunawijaya, 2015) mengatakan jumlah komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress*.

Faktor yang kedua adalah independensi komite audit yaitu hubungan keterkaitan anggota komite audit dengan kegiatan yang ada diperusahaan memiliki keterkaitan seberapa besar. Dimana arti independen yaitu pihak yang tidak terlibat dalam tugas-tugas pihak manajemen, dimana tugas dari pihak manajemen berfungsi sebagai orang yang menjalankan perusahaan (Gunawijaya, 2015). Pentingnya peranan dari independensi komite audit yaitu memberikan suatu pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris seperti menelaah informasi keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan agar perusahaan bisa terbebas dari suatu permasalahan seperti *financial distress* (Pembayun dan Januarti, 2012). Dengan adanya independensi dewan komisaris maka akan menambahkan rasa percaya diri dari investor atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan sehingga akan mengurangi keadaan dari *financial distress* (Gunawijaya, 2015). Oleh karena itu menurut Prastiti dan Meiranto (2013) mengatakan bahwa dalam teori keagenan diperlukannya tindakan pengawasan dari komite audit supaya pihak *agent* (manajemen) tidak melaksanakan suatu aktivitas yang bisa menguntungkan bagi dirinya sendiri dan dapat merugikan pihak *principal* (pemilik perusahaan). Penelitian yang dibuat oleh Magdalena (2009; dalam Gunawijaya, 2015) mengatakan bahwa proporsi dari komisaris independen berdampak secara negatif dengan *financial distress*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Adityaputra (2011; dalam

Gunawijaya, 2015) mengatakan bahwa proporsi dari komisaris independens berpengaruh positif terhadap *financial distress*.

Faktor yang ketiga yaitu aktivitas dari komite audit yang dapat diwujudkan dalam satu tahun dengan adanya suatu frekuensi pertemuan komite audit. Pentingnya dari pertemuan komite audit ini merupakan salah satu bentuk dari media untuk berkomunikasi secara formal oleh para anggotanya dalam memantau setiap proses *corporate governance* dan memahami semua pernyataan yang sepertinya bisa mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, mengawasi apakah perusahaan telah mematuhi undang-undang dan peraturan yang telah resmi serta mewajibkan pihak auditor internal mengungkapkan setiap perolehan temuannya dan hasil pemeriksaan mengenai *corporate governance* secara tertulis untuk mengurangi terjadinya *financial distress*. Dalam teori keagenan dikatakan bahwa dewan yang bersifat independen ini melakukan suatu pengendalian yang cukup efektif bagi manajemen, karena menurut Gunawijaya (2015) perusahaan yang mempunyai frekuensi pertemuan lebih banyak maka kemungkinan suatu peristiwa di masa mendatang mengenai *financial distress* lebih sedikit karena permasalahan yang timbul dari manajemen bisa terselesaikan secara langsung sehingga kesalahan dalam membuat keputusan tidak akan terjadi. Penelitian yang dilakukan oleh Kristanti dan Syafruddin (2012) mengatakan bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Wulandari (2010; dalam Pembayun dan Januarti, 2012) mengatakan bahwa pertemuan komite audit berpengaruh positif terhadap *financial distress*.

Faktor yang keempat yaitu kompetensi yang dimiliki anggota komite audit memiliki hubungan dengan pengetahuan dan pengalaman pada keuangan atau akuntansi yang profesional, karena mempunyai latar belakang pendidikan menjadi karakteristik yang penting untuk mendukung perannya Rahmat (2009; dalam Treskawati, 2014). Ketika anggota dari komite audit menguasai bidang akuntansi dan keuangan maka pekerjaan yang mereka kerjakan dapat berjalan dengan efektif, karena mereka memiliki pengetahuan yang baik mengenai akuntansi dan keuangan sehingga hasil dari laporan keuangan tidak mengalami *financial distress* (Gunawijaya, 2015). Oleh karena itu dalam teori agensi faktor ini dibutuhkan

untuk memahami setiap permasalahan mengenai ketertarikan yang sering timbul antara pihak manajemen dengan pihak pemegang saham. Sehingga penelitian yang dilakukan Kristanti dan Syafruddin (2012) mengatakan bahwa kompetensi komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Wulandari, (2010; dalam Pembayun dan Januarti, 2012) mengatakan adanya pengaruh positif dari kompetensi komite audit terhadap *financial distress*.

Selain untuk mendapati keterkaitan antara karakteristik komite audit terhadap *financial distress*, dimana menurut Irwanto (2013) *financial distress* bisa dipengaruhi oleh kinerja perusahaan karena kinerja perusahaan menentukan bagaimana kesehatan dari perusahaan tersebut dilihat dari segala aspek. Irwanto (2013) menyatakan bahwa kepemilikan institusional menggambarkan jumlah persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh badan hukum ataupun institusi keuangan contohnya seperti perusahaan yang bergerak dibidang asuransi, dana pension, reksadana, bank serta institusi lainnya. Ketika kinerja perusahaan tersebut baik dan terus mengalami peningkatan maka perusahaan akan jauh dari keadaan *financial distress* (Irwanto, 2013). Selain itu kepemilikan institusional mempengaruhi kinerja perusahaan, Machmud (2008; dalam Irwanto, 2013) mengatakan kepemilikan institusional dapat mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Pengawasan tersebut akan menjamin kemakmuran bagi pemegang saham. Oleh karena itu tingginya kepemilikan saham pada investor institusional maka pemegang saham institusional bisa menggantikan ataupun memperkuat dari fungsi pengawasan oleh pihak dewan dalam suatu perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Nur DP, (2007; dalam Bodroastuti, 2009) mengatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Hal ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan Irwanto (2013) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh secara negatif terhadap *financial distress*.

Pada penelitian ini dipilihnya perusahaan manufaktur yang menghadapi *financial distress* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2018, karena dalam penelitian ini ingin menyampaikan data lanjutan perihal kinerja dari

komite audit dengan memeriksa setiap karakteristik dari komite audit pada perusahaan yang menghadapi *financial distress* (Gunawijaya, 2015). Penyebab dari kegagalan yang dialami oleh perusahaan mengenai *financial distress* dikarenakan kurang ataupun tidak adanya pengawasan mengenai kondisi keuangan, yang mana keuangan tersebut digunakan tidak sesuai dengan kebutuhannya (Fachrudin, 2008; dalam Yudha dan Fuad, 2014). Keadaan atau kondisi dari perusahaan yang sehat atau tidak sehat dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan tersebut. Kondisi dari perusahaan dapat terlihat sehat ketika kita melihat laporan tahunan dari perusahaan tersebut telah diaudit oleh pihak independen yang berasal dari luar perusahaan (eksternal) (Irwanto, 2013). Ketika kinerja dari perusahaan tersebut baik dan terus meningkat, maka pendapatan atau laba yang diperoleh perusahaan memiliki arus kas yang tinggi sehingga perusahaan bisa mengoperasikan segala aktivitas perusahaan dengan bijak dan terbebas dari *financial distress* maupun terancam pada kelangsungan usahanya (Muflihah, 2017).

Selain itu pada penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan suatu kontribusi yang signifikan mengenai evaluasi efektifitas komite audit dalam menghindari *financial distress* agar perusahaan dapat melakukan suatu tindak antisipasi serta mengetahui kondisi dari perusahaan yang mengarah pada kebangkrutan baik pada waktu saat ini atau di waktu yang akan datang (Damayani, Yuniarta dan Sinarwati, 2017). Sehingga keterkaitan antara *financial distress* dengan perusahaan manufaktur yaitu dimana sektor manufaktur merupakan salah satu sektor yang berhubungan dengan permodalan, barang ataupun jasa serta tenaga kerja (Damayani, Yuniarta dan Sinarwati, 2017). Ketika perusahaan tersebut mengalami *financial distress*, maka para *stakeholder* seperti pihak pemegang saham (investor), calon investor serta kreditur akan merasa malas untuk melakukan investasi ataupun memberikan pinjaman kepada perusahaan tersebut (Muflihah, 2017). Apabila perusahaan tersebut tidak dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ada, maka dapat dipastikan perusahaan tersebut tidak bisa melanjutkan usahanya atau dapat dikatakan perusahaan tersebut akan mengalami kebangkrutan.

Pada penelitian kali ini yang digunakan dalam karakteristik komite audit yaitu ukuran, independensi, frekuensi pertemuan, kompetensi dari anggota komite audit dengan tambahan kepemilikan institusional. Sampel dari penelitian ini diperoleh dari perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. Selain itu pada penelitian kali ini perusahaan manufaktur dapat dikatakan mengalami *financial distress* ketika perusahaan telah mengalami kerugian sebanyak dua periode secara berturut-turut (Damayanti, Yuniarta, dan Sinarwati, 2017).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menyimpulkan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah karakteristik komite audit (ukuran komite audit, anggota komite audit independen, frekuensi komite audit dan kompetensi dari anggota komite audit) berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya *financial distress* disuatu perusahaan?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya *financial distress* disuatu perusahaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, peneliti menyimpulkan tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh karakteristik komite audit (ukuran komite audit, anggota komite audit independen, frekuensi komite audit dan kompetensi dari anggota komite audit) terhadap kemungkinan terjadinya *financial distress* disuatu perusahaan
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap kemungkinan terjadinya *financial distress* disuatu perusahaan

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini dapat dijadikan pemahaman bagi dunia akademik mengenai pengaruh efektivitas komite audit, kepemilikan institusional dan reputasi auditor terhadap *financial distress*. Selain itu penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut maupun penelitian yang serupa.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai pengaruh efektivitas komite audit, kepemilikan institusional dan reputasi auditor terhadap *financial distress*. Selain itu juga menjadi informasi yang berguna bagi manajemen dalam pengaruh dari efektivitas komite audit, kepemilikan institusional dan reputasi auditor terhadap *financial distress*. Informasi tersebut diharapkan dapat membantu manajemen sebagai masukan dalam usaha mencegah terjadinya *financial distress*.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi terdiri dari 5 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang meliputi: teori keagenan, ukuran komite audit, anggota komite audit independensi, frekuensi pertemuan komite audit, kompetensi komite audit, dan kepemilikan institusional; penelitian terdahulu; pengembangan hipotesis serta rerangka penelitian.

BAB 3. METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan desain penelitian; identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel; jenis dan sumber data; metode pengumpulan data; populasi, sampel, dan teknik penyampelan; serta analisis data.

BAB 4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, hasil analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB 5. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan simpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran bagi penelitian selanjutnya.